

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan tujuan utama bagi setiap keluarga. Istilah ini diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan mereka agar dapat hidup dengan layak, sehat, dan produktif. Menurut data dari BPS (2023), sekitar 25,90 juta orang di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, artinya mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Mayoritas dari penduduk miskin ini tinggal di daerah pedesaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor pertanian. Penghasilan seseorang sangat mempengaruhi ketenangan dan kesejahteraan hidup mereka. Ketidaksejahteraan dalam rumah tangga sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri. Kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Namun, kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia masih tergolong rendah, dengan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pertumbuhan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia perlu dilakukan dengan memberdayakan daerah-daerah (Adi, 2015).

Kesejahteraan ekonomi merupakan konsep yang merujuk pada tingkat kesejahteraan finansial dan material yang dirasakan oleh individu atau kelompok dalam suatu Masyarakat (Mas,2023). Aspek-aspek yang tercakup dalam kesejahteraan ekonomi meliputi pendapatan, kekayaan, akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan layanan kesehatan, serta kemampuan individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup yang layak. Kesejahteraan ekonomi merupakan konsep yang merujuk pada tingkat kesejahteraan finansial dan material yang dirasakan oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Satu kebutuhan terpenuhi akan muncul kebutuhan lain. Menurut Allan (2000), kebutuhan ini akan terus bertambah dan berkembang baik dalam jumlah maupun kualitasnya seiring dengan kemajuan peradaban manusia.

Teori Rawls tentang prinsip perbedaan memberikan perspektif penting terkait dengan persepsi kesejahteraan masyarakat. Prinsip perbedaan Rawls mengemukakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan maksimal bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Prinsip ini tidak hanya menekankan pentingnya efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan distribusi. Menurut Rawls, ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang paling tidak diuntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan upaya untuk melindungi kepentingan kelompok yang paling lemah dalam masyarakat, sehingga tercipta keadilan sosial yang lebih besar (Mas, 2023). Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, Rawls berpendapat bahwa dalam sistem kerjasama sosial yang adil, ketidaksetaraan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan kelompok yang paling lemah, bahkan jika ketidaksetaraan tersebut diizinkan untuk mendorong efisiensi ekonomi dan pertumbuhan. Dengan kata lain, prinsip perbedaan Rawls memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kemajuan peradaban manusia tidak hanya menguntungkan mereka yang sudah sejahtera, tetapi juga memperbaiki kondisi hidup mereka yang paling membutuhkan. Ini menekankan pentingnya mengukur kesejahteraan masyarakat tidak hanya dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari seberapa besar perbaikan yang dirasakan oleh kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.

Persepsi kesejahteraan masyarakat juga berkaitan erat dengan rasa keadilan dan kesetaraan yang dirasakan oleh individu dalam masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa distribusi sumber daya dan peluang dilakukan secara adil dan merata, maka tingkat kepuasan dan kesejahteraan secara keseluruhan akan meningkat. Persepsi ini bisa diperkuat melalui kebijakan publik yang fokus pada inklusi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan demikian, prinsip perbedaan Rawls tidak hanya relevan dalam teori keadilan, tetapi juga dalam praktik kesejahteraan masyarakat, dimana keadilan distributif menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat diukur dari tingkat penghasilan, kesehatan, dan tabungan. Data saat ini bahwa penghasilan perkapita Indonesia

Tabel 1. Pendapatan Perkapita Indonesia berdasarkan Provinsi Tahun 2022

| No. | Provinsi | Pendapatan Perkapita (Rupiah) |
|-----|----------------------|-------------------------------|
| 1 | DKI Jakarta | 298.359.970 |
| 2 | Kalimantan Timur | 238.700.720 |
| 3 | Kalimantan Utara | 190.611.100 |
| 4 | Riau | 149.914.130 |
| 5 | Kep. Riau | 141.682.650 |
| 6 | Sulawesi Tengah | 105.545.360 |
| 7 | Papua Barat | 77.149.680 |
| 8 | Jambi | 76.096.400 |
| 9 | Kalimantan Tengah | 72.945.070 |
| 10 | rerata Indonesia | 71.030.850 |
| 11 | Sumatera Selatan | 68.338.100 |
| 12 | Jawa Timur | 66.364.730 |
| 13 | Sulawesi Selatan | 65.593.030 |
| 14 | Kep. Bangka Belitung | 63.752.240 |
| 15 | Sumatera Utara | 63.194.180 |
| 16 | Banten | 60.990.140 |
| 17 | Kalimantan Selatan | 60.079.320 |
| 18 | Papua | 59.411.790 |
| 19 | Sulawesi Utara | 59.043.360 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 58.764.270 |
| 21 | Bali | 55.544.660 |
| 22 | Maluku Utara | 53.741.050 |
| 23 | Sumatera Barat | 50.593.410 |
| 24 | Jawa Barat | 49.038.410 |
| 25 | Kalimantan Barat | 46.161.330 |
| 26 | Lampung | 45.129.340 |
| 27 | DI Yogyakarta | 44.044.640 |
| 28 | Bengkulu | 43.741.710 |
| 29 | Jawa Tengah | 42.149.540 |
| 30 | Gorontalo | 39.886.780 |
| 31 | Aceh | 39.156.010 |
| 32 | Sulawesi Barat | 37.070.310 |
| 33 | Nusa Tenggara Barat | 28.672.540 |
| 34 | Maluku | 28.533.850 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pendapatan per kapita merupakan indikator utama dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu negara. Indikator ini menggambarkan rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu dalam satu tahun. Selama lima tahun terakhir, data pendapatan per kapita di Indonesia menunjukkan variasi yang beragam. Hal ini mencerminkan pengaruh berbagai faktor, baik domestik maupun global, terhadap kondisi ekonomi. Beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam fluktuasi pendapatan per kapita yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, analisis pendapatan per kapita menjadi penting untuk memahami dinamika ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. Angka Harapan Hidup Berdasarkan Provinsi Tahun 2022

| Provinsi | Angka Harapan Hidup |
|---------------------------|----------------------------|
| DI Yogyakarta | 75.08 |
| Kalimantan Timur | 74.62 |
| Bali | 74.48 |
| DKI Jakarta | 73.32 |
| Jawa Barat | 72.42 |
| Jawa Tengah | 72.12 |
| Sulawesi Utara | 72.08 |
| Riau | 71.67 |
| Jambi | 71.5 |
| Kalimantan Utara | 71.5 |
| Kepulauan Riau | 71.4 |
| Jawa Timur | 71.38 |
| Sulawesi Tenggara | 71.21 |
| Kalimantan Barat | 71.02 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70.98 |
| Sulawesi Selatan | 70.97 |
| Sumatera Selatan | 70.9 |
| Aceh | 70.18 |
| Lampung | 70.09 |
| Kalimantan Tengah | 70.08 |
| Banten | 70.02 |
| Sumatera Utara | 69.96 |
| Bengkulu | 69.69 |

| | |
|---------------------|-------|
| Maluku Utara | 69.46 |
| Kalimantan Selatan | 69.13 |
| Sumatera Barat | 69.09 |
| Sulawesi Tengah | 68.83 |
| Gorontalo | 68.51 |
| Nusa Tenggara Timur | 67.47 |
| Nusa Tenggara Barat | 67.07 |
| Maluku | 66.45 |
| Papua Barat | 66.14 |
| Papua | 65.93 |
| Sulawesi Barat | 65.53 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat kesehatan di Indonesia diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), yang menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun 2019 hingga 2023. Data menunjukkan bahwa AHH meningkat dari 71.5 pada tahun 2019 menjadi 72.2 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, kesejahteraan ekonomi, serta efektivitas kebijakan kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Faktor-faktor seperti peningkatan infrastruktur kesehatan, program imunisasi, dan promosi gaya hidup sehat berkontribusi signifikan terhadap tren positif ini. AHH yang terus meningkat tidak hanya menggambarkan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik tetapi juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Tabel 3. Jumlah tabungan masyarakat Indonesia

| Tahun | Year | Nominal (Rp Trillion) | Pertumbuhan (YoY) | Rekening (Accounts) | Pertumbuhan Rekening (YoY) |
|--------|------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 24-Mar | 2024 | 8668 | 71% | 570674798 | 11,6% |
| Des-23 | 2023 | 8515 | 3,8% | 559914590 | 10,1% |
| Des-22 | 2022 | 8203 | 8.70% | 508546341 | 31,6% |
| Des-21 | 2021 | 7546 | 12,0% | 386319094 | 10,3% |
| Des-20 | 2020 | 6737 | 10,9% | 350324950 | 16,1% |

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah tabungan masyarakat mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga Maret 2024. Pada Maret 2024, nominal tabungan mencapai Rp 8668 triliun, dengan pertumbuhan tahunan (YoY)

sebesar 71%. Jumlah rekening juga meningkat dari 350.324.950 pada tahun 2020 menjadi 570.674.798 pada Maret 2024, menunjukkan pertumbuhan 11,6% YoY. Pertumbuhan yang konsisten ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, di mana lebih banyak individu memiliki kapasitas untuk menabung, menunjukkan adanya perbaikan dalam stabilitas ekonomi dan peningkatan pendapatan yang berdampak positif pada kesejahteraan secara keseluruhan

Beberapa hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui penguatan credit union, yang menyediakan akses pinjaman dengan suku bunga rendah, dan pembagian deviden yang adil.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki pendapatan per kapita yang cukup besar, berada pada urutan ke-15 secara nasional dengan nilai Rp 63.194.180. Namun, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara, perlu adanya upaya peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Akses yang lebih baik ke sumber daya ini dapat mendukung peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, DKI Jakarta memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia dengan Rp 298.359.970, diikuti oleh Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Rata-rata pendapatan per kapita Indonesia berada di angka Rp 71.030.850. Sumatera Utara, dengan posisinya di urutan ke-15, masih memiliki ruang untuk peningkatan melalui pengembangan infrastruktur dan layanan yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber daya manusia di provinsi tersebut.

Dalam hal angka harapan hidup Sumatera Utara berada di urutan ke-22 di antara Provinsi-provinsi di Indonesia dengan angka harapan hidup sebesar 69.96 tahun. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, masih terdapat tantangan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya ekonomi untuk memperbaiki angka harapan hidup di provinsi ini.

Tingkat tabungan di Sumatera Utara (Sumut) masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada tahun 2022, tingkat tabungan rata-rata di Sumut hanya sebesar 5,2%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 6,2%. Tingkat tabungan yang rendah di Sumatera Utara perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Dengan berbagai upaya, seperti meningkatkan pendapatan, edukasi keuangan, dan promosi budaya menabung, diharapkan tingkat tabungan di Sumut dapat meningkat dan masyarakat Sumut dapat lebih siap menghadapi masa depan.

Credit Union atau selanjutnya akan di sebut dengan CU merupakan lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri, menawarkan akses ke layanan keuangan dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan lembaga keuangan tradisional. CU memberikan akses ke pinjaman dengan bunga rendah dan memberikan deviden dari keuntungan yang diperoleh kepada anggotanya. Ini tidak hanya membantu meningkatkan stabilitas keuangan individu tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM).

Salah satu contoh CU yang beroperasi di Indonesia adalah PUSKOPCUINA (Pusat Koperasi Credit Union Indonesia). PUSKOPCUINA telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun dalam hal jumlah anggota, aset, dan kredit yang beredar. Tabel berikut memberikan gambaran tentang perkembangan CU di PUSKOPCUINA dari tahun 2015 hingga 2019:

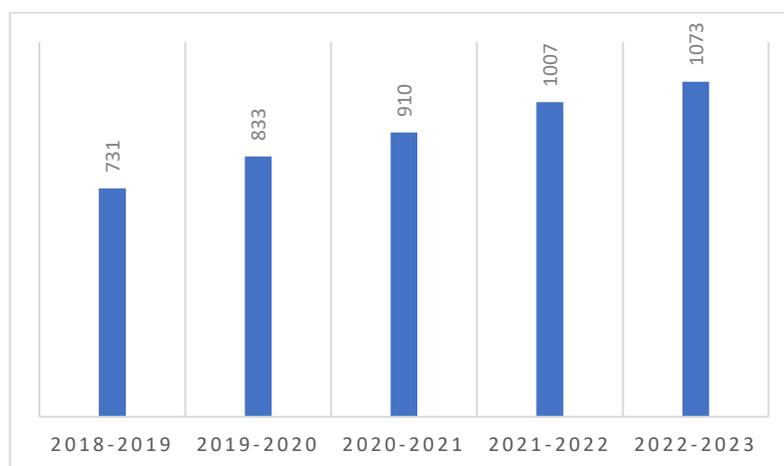
Tabel 4 Data Jumlah CU di PUSKOPCUINA Tahun 2015 – 2019

| Tahun | Jumlah CU di PUSKOPCUINA | Jumlah Anggota | Aset | Kredit Beredar |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2015 | 40 | 424.503 | 5.815.675.999.880 | 4.257.011.987.915 |
| 2016 | 40 | 435.833 | 6.099.901.369.977 | 4.320.765.709.489 |
| 2017 | 40 | 441.485 | 6.202.010.582.337 | 4.142.603.299.693 |
| 2018 | 40 | 448.408 | 6.393.050.834.517 | 4.365.288.005.957 |

| | | | | |
|------|----|---------|-------------------|-------------------|
| 2019 | 40 | 466.812 | 6.649.261.637.199 | 4.518.898.557.893 |
|------|----|---------|-------------------|-------------------|

Sumber : Laporan PUSKOPCUINA Tahun 2015 - 2019

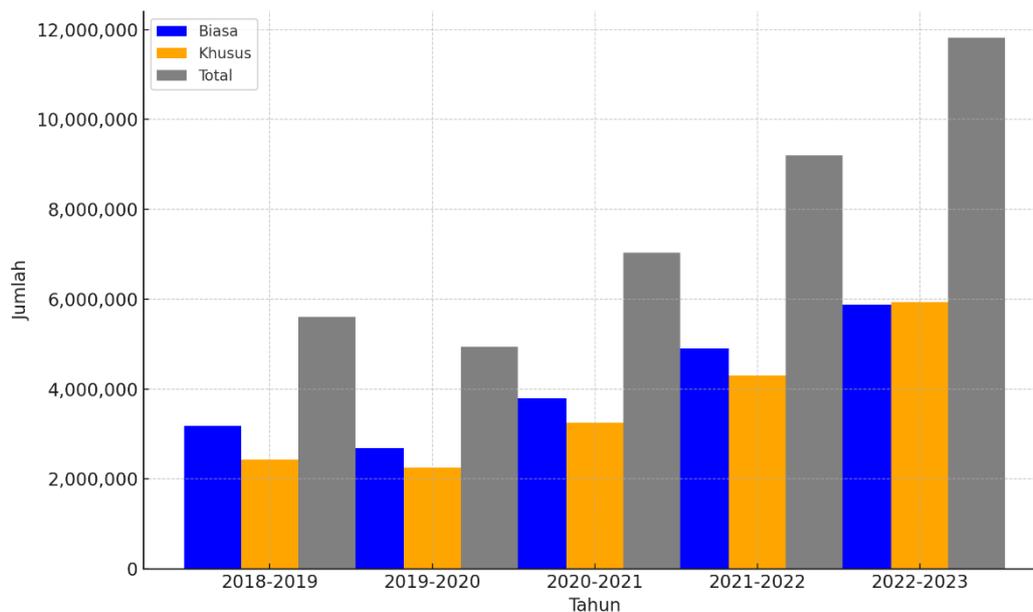
Berdasarkan data pada tabel 4, terlihat bahwa perkembangan jumlah anggota berkontribusi terhadap peningkatan jumlah aset yang berhasil dihimpun oleh CU, dengan pertumbuhan rata-rata di atas 85% dari tahun 2015 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan CU di Indonesia melalui gerakan PUSKOPCUINA sangat positif.



Sumber: Laporan Tahunan Credit Union Desa Lingga Julu 5 Tahun terakhir

Gambar 1. Jumlah Anggota Aktif CU Desa Lingga Julu

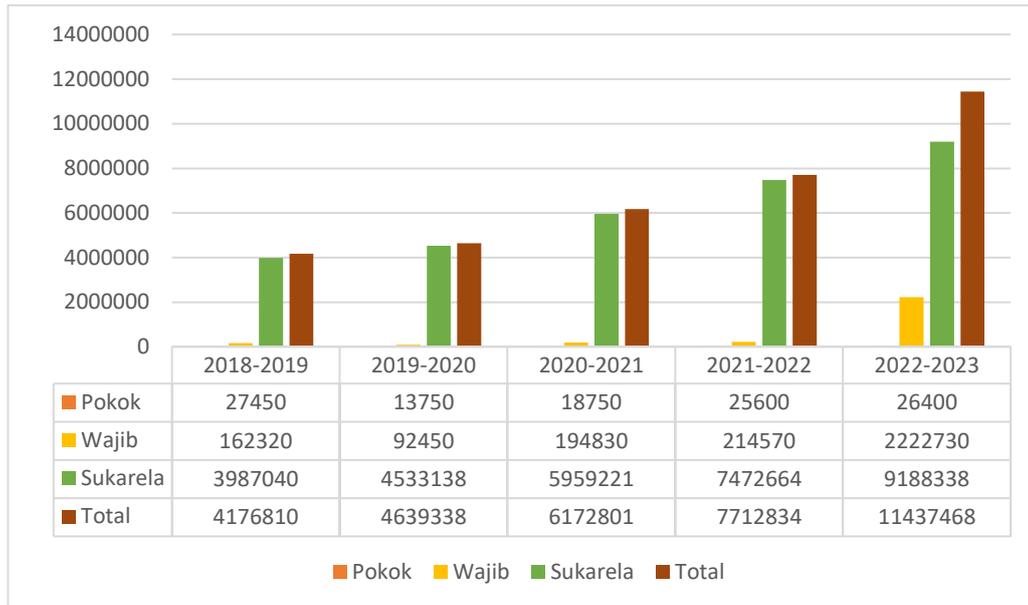
Gambar 1 menunjukkan jumlah anggota aktif CU Desa Lingga Julu selama lima tahun terakhir yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Besarnya manfaat yang ditawarkan oleh CU pada desa Lingga Julu berdampak pada peningkatan anggota setiap tahunnya. Anggota CU pada desa Lingga Julu memanfaatkan CU sebagai layanan simpan-pinjam dan kemudian akan mendapatkan deviden.



Sumber: Laporan Tahunan CU Desa Lingga Julu 5 Tahun terakhir

Gambar 2. Besar Pinjaman Anggota CU Desa Lingga Julu (dalam rupiah)

Gambar 2 menunjukkan besar pinjaman anggota CU Desa Lingga Julu selama lima tahun terakhir. Pinjaman biasa menunjukkan pinjaman yang tidak membutuhkan jaminan dengan jumlah maksimal Rp 40 juta per keluarga dan pinjaman khusus menunjukkan pinjaman yang membutuhkan jaminan dimana per keluarga diperbolehkan untuk meminjam diatas Rp 50 juta. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan pada pinjaman anggota CU Desa Lingga Julu adalah harga komoditas yang menurun, perubahan pada cuaca yang menyebabkan petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk menjaga hasil tani, serta meningkatnya produksi petani.

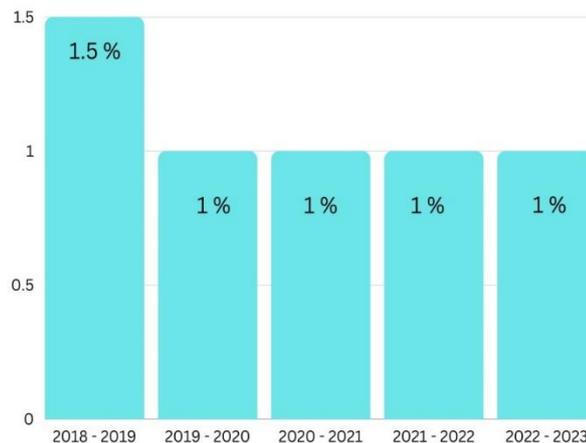


Sumber: Laporan Tahunan CU Desa Lingga Julu 5 Tahun terakhir

Gambar 3. Besar Simpanan Anggota CU Desa Lingga Julu (dalam rupiah)

Gambar 3 menunjukkan perkembangan simpanan anggota CU Desa Lingga Julu selama lima tahun terakhir (2018-2019 hingga 2022-2023). Simpanan pokok merupakan simpanan awal masuk yang tidak dapat ditarik, simpanan wajib merupakan simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota setiap bulan, dan simpanan sukarela merupakan simpanan bebas. Simpanan pokok cenderung stabil, sedangkan simpanan wajib mengalami peningkatan signifikan. Simpanan sukarela mengalami peningkatan tajam, mencerminkan kepercayaan anggota terhadap CU. Besar simpanan anggota CU Desa Lingga Julu terus meningkat karena adanya pertumbuhan pada jumlah anggota CU, selain itu, produktivitas pendapatan masyarakat juga meningkat, hal tersebut mencerminkan pertumbuhan ekonomi desa yang kuat.

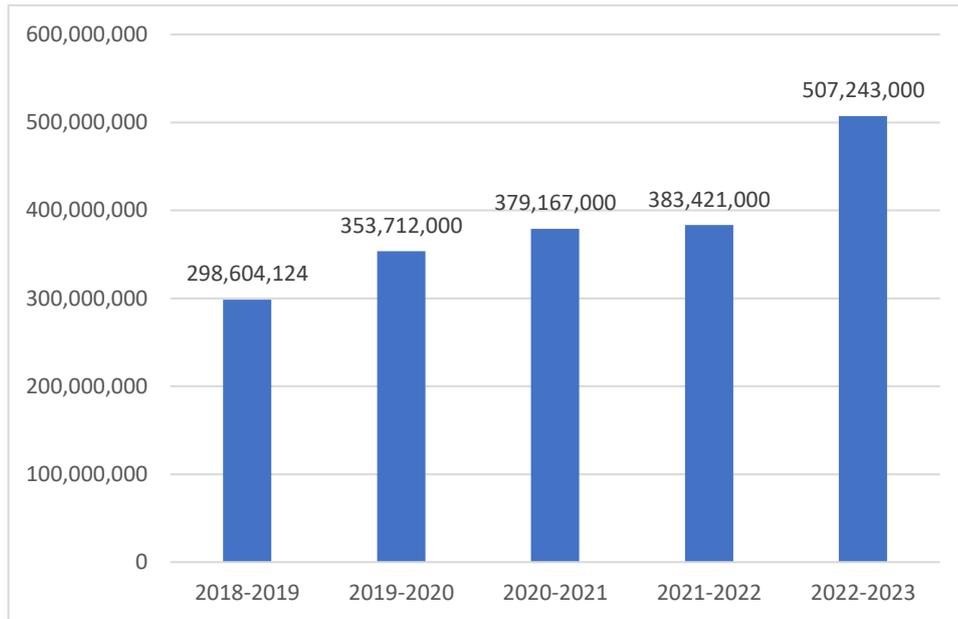
Selain itu, kebijakan suku bunga yang kompetitif memainkan peran penting dalam meningkatkan daya beli dan investasi masyarakat. Suku bunga yang rendah untuk pinjaman memfasilitasi akses ke modal, sementara suku bunga yang lebih tinggi untuk tabungan mendorong masyarakat untuk menabung lebih banyak. Dividen yang dibagikan oleh CU kepada anggotanya juga menambah pendapatan dan memperkuat kondisi keuangan individu, sehingga meningkatkan kesejahteraan keseluruhan Masyarakat



Sumber: Laporan Tahunan CU Desa Lingga Julu 5 Tahun terakhir

Gambar 4. Tingkat Suku Bunga Credit Union 5 Tahun Terakhir

Gambar 4 menunjukkan bahwa CU Desa Lingga Julu memiliki tingkat suku bunga yang stabil. Tingkat suku bunga 1 % tersebut adalah yang akan dibayarkan setiap bulan kepada anggota. Namun tingkat suku bunga yang di berikan CU merupakan suku bunga setiap tahunnya sehingga setiap tahun akan di lakukan diskusi bersama anggota untuk menentukan tingkat suku bunga pada CU. Stabilitasnya tingkat suku bunga ini menunjukkan bagaimana CU memberikan layanan akses keuangan yang lebih mudah kepada masyarakat. Faktor yang terakhir adalah dividen bunga. Dividen bunga adalah pembayaran yang diberikan kepada pemegang saham atas investasi mereka dalam bentuk bunga. Berbeda dengan dividen reguler yang dibayarkan dari laba perusahaan kepada pemegang saham biasa, dividen bunga biasanya lebih terstruktur dan kurang bergantung pada kinerja tahunan perusahaan, karena umumnya merupakan kewajiban kontraktual. Jadi, dividen bunga adalah istilah yang mengacu pada pembayaran bunga tetap yang diterima investor dari investasi mereka, baik dalam bentuk saham preferen atau obligasi, sebagai kompensasi atas modal yang telah mereka investasikan. Hubungan antara dividen bunga dan *credit union* bahwa dividen ini merupakan bentuk distribusi pendapatan kepada anggota yang memiliki simpanan di *credit union*. Ini berbeda dari bunga yang dibayarkan oleh bank komersial, karena dividen berasal dari keuntungan lembaga nirlaba yang dimiliki oleh anggotanya (Azarya, 2018).



Sumber: Laporan Tahunan CU Desa Lingga Julu 5 Tahun terakhir

Gambar 5. Deviden CU Desa Lingga Julu (dalam rupiah)

Gambar 5 menunjukkan deviden CU Desa Julu selama lima tahun terakhir. Meningkatnya deviden CU Desa Lingga Julu sesuai dengan meningkatnya besaran pada simpanan dan juga pinjaman yang dilakukan oleh anggota CU Desa Lingga Julu. Wilayah Sumatera memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 22,03%. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi ekonomi wilayah ini adalah kemudahan peminjaman, rendahnya suku bunga, dan besarnya deviden. Kemudahan dalam mendapatkan pinjaman memacu aktivitas ekonomi karena masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mengakses modal untuk pengembangan usaha. Rendahnya suku bunga juga mendorong peningkatan pinjaman dan investasi, karena biaya yang lebih rendah membuat masyarakat lebih berani meminjam untuk investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Dividen yang besar memberikan keuntungan tambahan bagi pemegang saham, meningkatkan konsumsi dan investasi lebih lanjut.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini memiliki dampak positif pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan memperhatikan pendapatan per kapita dan PDRB di Sumatera Utara, terlihat jelas bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat berdampak signifikan pada ekonomi regional

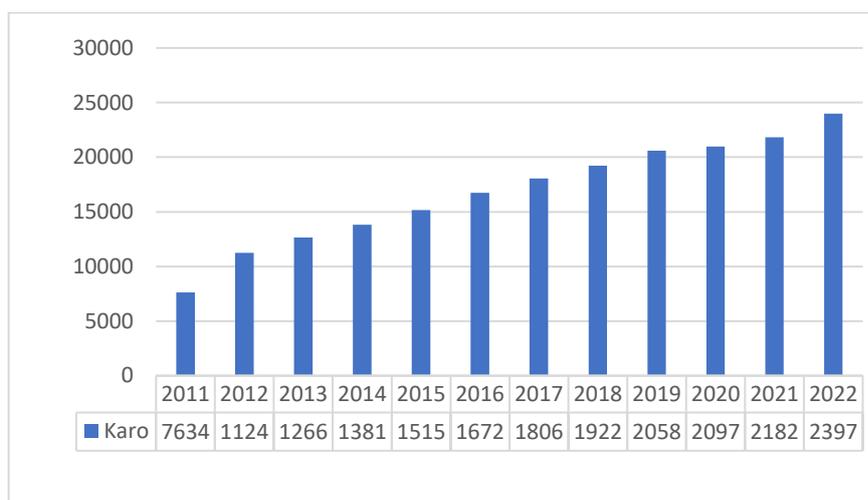
Tabel 5. Kontribusi PDRB Kabupaten Karo dalam Provinsi Sumatera Utara tahun 2022

| No. | Kabupaten/Kota | PDRB |
|-----|---------------------|-----------|
| 1 | Medan | 280159,04 |
| 2 | Deli Serdang | 127546,55 |
| 3 | Langkat | 51412,77 |
| 4 | Simalungun | 47285,89 |
| 5 | Asahan | 46575,32 |
| 6 | Labuhan Batu | 41809,01 |
| 7 | Batu Bara | 40866,72 |
| 8 | Labuhanbatu Selatan | 34154,82 |
| 9 | Serdang Bedagai | 33517,99 |
| 10 | Labuanbatu Utara | 30282,5 |
| 11 | Karo | 23975,57 |
| 12 | Tapanuli Selatan | 17051,89 |
| 13 | Mandailing Natal | 16403,53 |
| 14 | Pematangsiantar | 15208,31 |
| 15 | Padang Lawas | 14586,76 |
| 16 | Padang Lawas Utara | 14375,3 |
| 17 | Binjai | 13315,95 |
| 18 | Tapanuli Tengah | 11635,3 |
| 19 | Dairi | 10716,94 |
| 20 | Tanjungbalai | 10466,14 |
| 21 | Tapanuli Utara | 9645,64 |
| 22 | Toba Samosir | 8943,89 |
| 23 | Nias Selatan | 8014,5 |
| 24 | Padangsidempuan | 7384,96 |
| 25 | Tebing Tinggi | 6931,27 |
| 26 | Humbang Hasundutan | 6919,49 |
| 27 | Gunungsitoli | 6476,83 |
| 28 | Sibolga | 6340,37 |
| 29 | Samosir | 5166,25 |
| 30 | Nias Utara | 4172,94 |
| 31 | Nias Barat | 2172,22 |

| No. Kabupaten/Kota | PDRB |
|--------------------|---------|
| 32 Pakpak Bharat | 1393,58 |

Sumber: BPS Sumatera Utara

Lingga Julu merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pemilihan Desa Lingga Julu di Kabupaten Karo untuk penelitian ini juga didukung oleh data PDRB Kabupaten Karo. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo mencapai jumlah sebesar 23.975,57 miliar rupiah.



Sumber: BPS Sumatera Utara 2023.

Gambar 6. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Kabupaten Karo dalam Provinsi Sumatera Utara 10 Tahun Terakhir.

Gambar 6 menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo mengalami peningkatan secara signifikan selama 10 Tahun terakhir. Dilihat dari tahun 2011, PDRB Kabupaten Karo mencapai 7,634.39 miliar rupiah, dan angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 23,975.57 miliar rupiah pada tahun 2022.

Pentingnya kontribusi Kabupaten Karo terhadap PDRB Sumatera Utara juga dapat diartikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Konsep ini terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sering kali dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks tingkat pendapatan suatu daerah (Wicaksono et al, 2021). Namun, dalam hal ini kesejahteraan tidak

hanya dilihat dari sudut pandang finansial, tetapi juga mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang pekerjaan.

Teori Modal Manusia oleh Gary S. Becker mengajukan pandangan bahwa pendidikan dan pengembangan keterampilan individu dapat dianggap sebagai investasi modal manusia. Gary S. Becker mengemukakan bahwa pendidikan dan keterampilan individu dapat dianggap sebagai bentuk modal, serupa dengan modal fisik seperti peralatan dan mesin dalam produksi. Menurut Becker, investasi dalam sumber daya manusia, seperti pendidikan tinggi dan pelatihan, dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan individu (Atmanti, 2005). Becker juga berpendapat bahwa pendidikan dan keterampilan individu dapat dianggap sebagai modal manusia, yang secara signifikan berkontribusi pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Namun, dalam penelitian ini kesejahteraan Masyarakat yang di maksud yaitu kenaikan penghasilan Masyarakat, Kesehatan keluarga yang lebih baik dan investasi ekonomi berupa tabungan, sejalan dengan prespektif (Imron 2012). Penghasilan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan. Ini berpotensi meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan penghasilan ini dapat di ukur menggunakan Produk Domestik Rasional Bruto (PDRB) Perkapita. Sumatera utara 5 tahun terakhir mengalami peningkatan PDRB Perkapita yang cukup signifikan.

Tabel 6. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (juta rupiah) Sumatera Utara 5 Tahun Terakhir

| Tahun | PDRB Perkapita |
|-------|----------------|
| 2018 | 51.42 |
| 2019 | 54.91 |
| 2020 | 54.98 |
| 2021 | 57.57 |
| 2022 | 63.19 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2023

Data PDRB per kapita Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2022 mencerminkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada tahun 2018, PDRB per kapita sebesar 51.42 meningkat menjadi 54.91 pada tahun 2019, dengan tren

pertumbuhan yang stabil di angka 54.98 pada tahun 2020. Tahun 2021 mencatat pertumbuhan lebih lanjut menjadi 57.57, dan terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022 menjadi 63.19. Tren ini menciptakan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan PDRB per kapita mencerminkan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, dan pendidikan. Standar hidup masyarakat Sumatera Utara mungkin meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, menciptakan peluang pekerjaan lebih banyak, memajukan pengembangan keterampilan, dan mendorong partisipasi ekonomi yang lebih aktif. Kesejahteraan fisik dan mental masyarakat juga dapat meningkat dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan.

Selain peningkatan penghasilan kesejahteraan masyarakat juga diukur melalui kesehatan keluarga yang lebih baik. Kesehatan yang baik memberikan dasar bagi orang untuk menjalani kehidupan yang produktif dan berkualitas. Serta kesehatan yang baik meningkatkan kemampuan untuk bekerja, belajar, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi suatu Negara.

Tabel 7. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Sumatera Utara 2018 - 2022

| Tahun | Persentase |
|--------------|-------------------|
| 2018 | 24.86 |
| 2019 | 26.28 |
| 2020 | 26.12 |
| 2021 | 20.45 |
| 2022 | 30.01 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2023

Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat kecenderungan peningkatan keluhan kesehatan, yang dapat dihubungkan dengan sejumlah faktor, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, kondisi lingkungan, dan gaya hidup. Stabilisasi pada tahun 2020 menunjukkan kemungkinan penanganan masalah kesehatan atau penyesuaian terhadap faktor-faktor penyebab keluhan. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang signifikan dalam persentase penduduk yang melaporkan keluhan kesehatan, memberikan indikasi positif terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan

dan perubahan perilaku hidup sehat. Meskipun demikian, lonjakan pada tahun 2022 menjadi perhatian serius dan membutuhkan evaluasi mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini, sehingga upaya kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Meskipun mencakup aspek-aspek tersebut secara keseluruhan, penelitian ini khususnya menyoroiti pada kenaikan penghasilan masyarakat, terutama di sektor pertanian. Menyadari kontribusi signifikan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanah Karo, berdasarkan data yang di peroleh dari website Kabupaten Karo menyebutkan bahwa Tidak kurang dari 75 persen penduduk Karo bermata pencaharian sebagai petani. peneliti bertujuan untuk memahami dan mengukur dampak pertumbuhan ekonomi pada tingkat lokal, khususnya bagaimana kenaikan penghasilan dalam sektor pertanian dapat memberikan sumbangan terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat .

Salah satu wilayah regional dari Kabupaten Karo yang memiliki kontribusi yang cukup signifikan, yakni Desa Lingga Julu, memiliki mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Desa Lingga Julu memiliki potensi pertanian yang subur dengan tanah yang cocok untuk berbagai jenis tanaman seperti padi, cabai, jagung, tomat, kol, kentang, serta tanaman lainnya (Sari, 2017).

Tabel 8. Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Jenis dan Desa/ Kelurahan 2020

| Jenis Ladang Pertanian Bukan Sawah | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Kelurahan/Desa | Tegal/ Kebun | Perkebunan |
| Beganding | 733 | 105 |
| Serumbia | 314 | 45 |
| Nang Belawan | 273 | 39 |
| Lingga | 1335 | 192 |
| Lingga Julu | 591 | 85 |
| Ndokum Siroga | 242 | 35 |
| Surbakti | 794 | 114 |
| Tiga Pancur | 283 | 41 |
| Berastepu | 872 | 125 |
| Pintu Besi | 199 | 29 |
| Jeraya | 233 | 33 |
| Perteguhén | 247 | 35 |
| Kuta Tengah | 284 | 41 |
| Torong | 331 | 47 |

| | | |
|------------|-----|----|
| Gajah | 374 | 53 |
| Bulan Baru | 308 | 44 |
| Gamber | 235 | 34 |

Sumber: BPS Kecamatan Simpang Empat (2021)

Tabel 8 Menunjukkan bahwa desa Lingga Julu berada pada urutan ke 5 terbesar dengan jumlah Tegal/ Kebun dan Perkebunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa desa Lingga Julu memiliki tingkat produksi terbesar ke 5 pada kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo . Tingkat produksi tersebut dilihat dari luas lahan yang dimiliki desa Lingga Julu untuk melakukan produksi. Sehingga luas lahan meningkat maka pendapatan petani juga akan meningkat (Pradnyawati, 2021). Pada akhirnya, kenaikan penghasilan tersebut akan meningkatkan daya beli, tingkat tabungan, dan standar hidup pelaku pertanian yang menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat tersebut meningkat (Rahman, H. 2018).

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Lingga Julu Tahun 2022

| NO | PEKERJAAN | JUMLAH |
|---------------|---------------------|--------------|
| 1 | ASN/TNI/POLRI | 10 |
| 2 | Karyawan | 43 |
| 3 | Wiraswasta | 100 |
| 4 | Tani | 970 |
| 5 | Pensiun | 5 |
| 6 | Pelajar/Mahasiswa | 500 |
| 7 | Jasa | 18 |
| 8 | Pedagang | 46 |
| 9 | Ibu Rumah tangga | 10 |
| 10 | Lain lain | 10 |
| 11 | Belum/Tidak Bekerja | 89 |
| JUMLAH | | 1.801 |

Sumber: Data Sensus Penduduk Desa Lingga Julu (2023)

Mayoritas penduduk desa Lingga Julu berprofesi sebagai petani dan memiliki rata-rata penghasilan yang masih tergolong menengah. Tantangan terbesar masyarakat desa Lingga Julu adalah jauhnya lokasi desa dengan kota besar sehingga akses kepada layanan keuangan dan sumber pembiayaan yang memadai

guna mendukung perkembangan ekonomi masyarakat sangat kurang dan sulit untuk diterima.

Untuk mengatasi hal tersebut para petani membutuhkan tambahan modal untuk melanjutkan produksinya. Meskipun sebagian modal dapat diperoleh dari tabungan petani, namun seringkali jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi segala kebutuhan produksi. Selain tabungan, petani dapat memperoleh modal tambahan melalui lembaga keuangan, seperti bank, untuk melanjutkan produksi. akan tetapi, seringkali tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank terlalu tinggi dan beban yang akan ditanggung oleh pelaku pertanian untuk melunasi pinjaman tersebut semakin berat. oleh karena itu, pelaku pertanian, membutuhkan lembaga keuangan lain yang dapat memberikan akses permodalan yang menawarkan tingkat suku bunga rendah agar penghasilan yang diperoleh lebih tinggi, sehingga tingkat kesejahteraannya dapat meningkat.

Salah satu sektor keuangan yang memiliki suku bunga yang cukup rendah dan sering beredar dalam lingkungan masyarakat terutama daerah Pedesaan yaitu *Credit union* (CU). CU berperan dalam memberikan layanan pinjaman dan simpanan di wilayah ekonomi yang kecil seperti pedesaan. Kehadiran CU dianggap mampu membantu masyarakat pedesaan untuk memfasilitasi kebutuhan dana di Masyarakat (Suranta, 2023).

Guna mendukung perkembangan ekonomi masyarakat desa Lingga Julu , dibentuklah CU atau koperasi kredit. Saat ini CU yang berada di desa Lingga Julu berada di bawah naungan PUPKOPDIT PERKELENG (Pusat Koperasi Kredit Persadan Kelompok Ate Keleng, PUPKOPDIT PERKELENG sendiri sudah berbadan hukum dengan nomor AHU-0001793.AH.01.26.tahun 2020. *Credit union* (selanjutnya akan disebut sebagai CU) memiliki fokus utama pada kegiatan simpan pinjam dengan kepemilikan dan pengelolaannya berada pada tangan anggotanya sendiri. CU seringkali menjadi entitas utama dalam usaha keuangan masyarakat desa Lingga Julu karena dapat meningkatkan potensi pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang menjadi hal strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya mengingat mayoritas masyarakat merupakan petani.

CU berbeda dari bank konvensional karena kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh anggotanya sendiri. Biasanya, CU menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan seperti tabungan, investasi, pinjaman, asuransi, serta layanan pembayaran dan transfer dana. Fokus utama CU adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses keuangan.

Prinsip utama dari CU adalah meliputi keanggotaan yang terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, memiliki kontrol demokratis oleh para anggota, memberikan layanan keuangan dengan biaya yang wajar, partisipasi aktif anggota dalam melakukan pengelolaan serta pengambilan keputusan, dan memberikan fasilitas pendidikan serta pelatihan keuangan bagi anggota.

CU sangat cocok untuk mendukung pembangunan ekonomi desa Lingga Julu karena sulitnya akses masyarakat terhadap bank konvensional dan layanan keuangan lainnya. Mayoritas petani desa Lingga Julu membutuhkan pembiayaan yang berguna untuk meningkatkan produksi dan daya saing. Hadirnya CU di desa Lingga Julu menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk kebutuhan ekonomi dari masyarakat dan petani desa Lingga Julu.

Adanya CU pada desa Lingga Julu diharapkan dapat membuat masyarakat untuk memanfaatkan potensi ekonomi dengan baik dan mengakses keuangan dengan mudah guna pengembangan usaha pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lingga Julu.

Berdasarkan paparan latar belakang, penelitian ini akan mengidentifikasi serta memahami dampak dari keberadaan CU terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa Lingga Julu secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Credit Union* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lingga Julu.” Serta penelitian ini juga membuat keputusan atau merumuskan kesimpulan dengan menggunakan data yang telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan.

I.2 Rumusan Masalah

Sektor keuangan memiliki peran dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satu kegiatan ekonomi yang termasuk dalam sector keuangan adalah CU yang

mempu menjangkau hingga ke pelosok desa. Desa Lingga Julu yang perekonomiannya didominasi oleh sector pertanian sangat terbantu dengan adanya CU untuk memberikan bantuan modal. Namun perlu dilakukan analisis apakah kehadiran CU di Desa Lingga Julu dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lingga Julu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diberikan, beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi kemudahan peminjaman mempengaruhi kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana persepsi tingkat suku bunga CU mempengaruhi kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana persepsi dividen bunga mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat ?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persepsi kemudahan peminjaman dari CU terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Lingga Julu.
2. Untuk menganalisis persepsi tingkat suku bunga dari CU terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Lingga Julu.
3. Untuk menganalisis persepsi dividen yang diterima dari CU terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Lingga Julu.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran CU dan berbagai faktor tertentu seperti persepsi kemudahan peminjaman, persepsi suku bunga, dan persepsi dividen dapat mempengaruhi persepsi kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

I.4.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pihak-pihak terkait, seperti lembaga keuangan mikro dan pemerintah setempat, mengenai cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan CU yang lebih efektif.